

# SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Gorontalo



---

## **Seremonial Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato TA 2022**

**Gorontalo, 17 Mei 2023**

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2022, Pukul 10.00 WITA dilaksanakan kegiatan Seremonial Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato untuk Tahun Anggaran 2022.

Acara Seremonial Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2022 dihadiri oleh Kepala Daerah, para Ketua DPRD serta Pejabat Struktural, Fungsional dan Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Kepala Daerah yang hadir pada kegiatan ini adalah Wali Kota Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Bupati Boalemo dan Bupati Pohuwato. Ketua DPRD yang hadir menerima LHP adalah Ketua DPRD Kota Gorontalo, Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ketua DPRD Kabupaten Boalemo dan Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato TA 2022 memperoleh opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN atau WTP”. Pencapaian opini WTP ini adalah pencapaian kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah bagi masing-masing daerah. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah dan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik.

Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk perbaikan, diantaranya.

### **Pada Pemerintah Kota Gorontalo**

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 belum memadai dengan permasalahan sebagai berikut:

---

**BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**

Website: [gorontalo.bpk.go.id](http://gorontalo.bpk.go.id)

Email: [perwakilan.gorontalo@bpk.go.id](mailto:perwakilan.gorontalo@bpk.go.id)

Instagram dan twitter: [bpkgorontalo](#)

- a. Penetapan anggaran pendapatan daerah dalam APBD tidak memperhitungkan potensi pendapatan yang riil dan terukur sehingga terjadi penambahan Utang Belanja pada Tahun 2022 senilai Rp49,01 miliar; dan
  - b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS melebihi anggaran pada APBD-Perubahan Tahun 2022 senilai Rp506,53 juta.
2. Kekurangan volume pada Belanja Modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp1,05 miliar dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp11,72 miliar yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe, dan RSUD Otanaha.

#### **Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango**

1. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dinas KPP), Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan (Dinas LHPP), dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPRPR) Tidak Sesuai Ketentuan, diantaranya tidak disertai dengan perjanjian, penggunaan langsung dan penggunaan tarif yang tidak seharusnya;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,01 miliar tidak sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dengan adanya pemberian *fee* kepada perusahaan yang dipinjam namanya sebesar 42,88 juta, pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp790,69 juta dan pertanggungjawaban belanja pemeliharaan dan sewa kendaraan yang digunakan untuk instansi lainnya sebesar Rp172,8 juta, yang terjadi pada 10 SKPD dan 11 Puskesmas; dan
3. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp534,78 juta dan belum dikenakan denda keterlambatan pada dua paket pekerjaan sebesar Rp23,89 juta pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat.

#### **Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo**

1. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp237,12 juta dan honorarium kegiatan sebesar Rp24,55 juta, serta terdapat realisasi belanja yang membebani keuangan daerah sebesar Rp1,39 miliar.
2. Kekurangan volume pada 25 paket pekerjaan di tiga SKPD sebesar Rp711,67 juta dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp1,36 miliar.
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib.

#### **Pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato**

1. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyajikan realisasi atas kesalahan penganggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,01 miliar pada sembilan SKPD.
2. Belanja pegawai berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan tidak sesuai ketentuan, sebesar Rp131,80 juta pada tahun 2013 s.d. 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp103,79 juta; dan

3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS oleh Satuan Pendidikan tidak sesuai ketentuan, yaitu ketekoran kas pada sepuluh sekolah sebesar Rp118,41 juta dan pertanggungjawaban dana BOS yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp94,40 juta.

#### **Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara**

BPK masih menemukan permasalahan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya sisa Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan tidak sesuai tujuan sumber pendanaan sebesar Rp5,05 miliar.

Pada kesempatan ini Walikota Gorontalo, Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev memberikan sambutannya mewakili Kepala Daerah serta Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, S.Pd., M.Si. memberikan sambutannya mewakili para Ketua DPRD yang hadir.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah terkait memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan. (htu/gto)